



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Dugaan Korupsi DD Gramat, Menguat**

**Inspektorat Segera Terbitkan LHP**

**KOTA BINTUHAN** - Agaknya, bakal bertambah lagi kades ataupun mantan kades yang tersandung masalah pengelolaan dana desa (DD) di Kaur. Kemarin (26/12) Polres Kaur bersama Inspektorat Kaur menggelar ekspos kasus dugaan penyalahgunaan DD Desa Gramat Kecamatan Kinal tahun anggaran 2018. Ekspos ini sebagai tindak lanjut penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur yang telah memeriksa saksi-saksi dan pengecekan lapangan. Dalam ekspos itu, penyidik menemukan dugaan kerugian Negara mencapai Rp 300 juta.

Dugaannya bersumber dari kegiatan fisik kegiatan non fisik. Seperti

sosialisasi hukum dan siskudes yang diduga fiktif. Kemudian pembangunan gedung desa yang juga diduga fiktif. Tidak hanya itu saja, Silpa Rp 35 juta dari DD tahun sebelumnya, tidak jelas penggunaannya.

Walaupun polisi sudah menemukan indikasi-indikasi kerugian Negara, tetapi dalam proses hukum selanjutnya tidak bisa digunakan. Sebab berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri, kerugian negara dari dana desa harus dihutungi oleh Inspektorat. Setelah Inspektorat mengeluarkan LHP, maka diserahkan ke polisi. Polisi akan memberikan waktu pada pihak yang bertanggung jawab mengembalikannya paling lama 60 hari setelah LHP diserahkan. Jika tidak dikembalikan, maka akan diproses hukum.

Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si mengatakan kalau ekspos ini untuk menyatukan hitungan kerugian negara. Antara yang dilakukan oleh pihak Polres Kaur dan Inspektorat Kaur nantinya. Setelah ekspos Inspektorat Kaur akan menurunkan tim untuk turun dan menghitung kerugian negara atas DD Gramat tahun 2018.

"Ekspos ini untuk menyingkronkan hasil penghitungan kerugian negara yang kita temukan dengan pihak Inspektorat sebagai auditor. Setelah ada penghitungan dari Inspektorat baru pihak Inspektorat mengeluarkan LHP. Dan LHP ini harus ditindak lanjut dengan pengembalian kerugian negara yang ada di LHP oleh mantan kades. Jika 60 hari tidak dikembalikan

maka kasus akan kita proses sesuai hukum," kata Ahmad Kairuman.

Berdasarkan data, untuk total DD Gramat tahun 2018 sebesar Rp 803 juta yang terbagi untuk pemberdayaan sebesar Rp 140,7 juta dan pembangunan Rp 534 juta lebih. Sementara untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rp 128 juta lebih. Dari data yang ada dialokasikan untuk pembangunan terdiri dari pembukaan jalan Rp 84 juta lebih, gedung kantor desa Rp 364,7 juta, pembangunan tembok penahan Rp 60,2 juta dan pembangunan siring pasang Rp 24,7 juta.

"Setelah ekspos ini tim akan bergerak turun ke lapangan melakukan penghitungan," pungkas Sekretaris Inspektorat Kaur Harles Faferman. (cik)